

APAKAH FLYPAPER EFFECT TERJADI DI ACEH? STUDI MENGUKUR KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Muhammad Hasan Basri
Pusat Informasi dan Kajian Ekonomi (Pike) Aceh
Jln. T. Iskandar No. 174A, Lamglumpang-Ulee Kareng, Banda Aceh
Email:mhasanbasri123@gmail.com

Riswandi
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
Email: rhendratno@yahoo.com; riswandi@fe.unsyiah.ac.id

Abstract

The objective of this study is to analyse the phenomenon of flypaper effect in Aceh after the implementation of fiscal decentralization. Data used in the study were panel data covering all 23 district/municipalities in Aceh from 2011 to 2013. Pooled Least Square was utilized. The results of this study revealed that own-source revenue, sharing revenue, special allocation funds, general allocation funds, and special autonomy funds are statistically significant variables and have a positive relation to regional spending. It was proven that flypaper effect has occurred in Aceh as the coefficient of the own-source revenue variabel was smaller than that of sharing revenue variabel. This implied that Aceh has been dependent on the national government in term of regional financing. Based on descriptive analysis, provinces having dominant share of tertiary sector to their regional gross domestic products show fiscally independent. In order to achieve fiscal independence, the phenomenon of flypaper effect could be overcome by shifting the economic structure from the primary and secondary to the tertiary sectors of the economy. In doing so, the contribution of own-source revenue to regional spending outweigh intergovernment transfer funds from national government.

Keywords: flypaper effect, pooled least square, panel data

PENDAHULUAN

Flypaper Effect istilah yang pertama sekali diperkenalkan oleh Arthur Okun merupakan salah satu terminologi keuangan daerah yang mendeskripsikan bagaimana respon belanja daerah terhadap dana transfer dari pemerintah ke pemerintah daerah (*inter-governmental transfer*) dan kemampuan daerah menghasilkan pendapatan aslinya. Istilah ini mulai terkenal setelah serangkaian penelitian dilakukan untuk mengukur apakah dengan adanya transfer dana antarpemerintah tersebut membuat pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten semakin mandiri dari perspektif keuangan publik.

Di era 1960-an, Okun telah menjelaskan bahwa flypaper effect merupakan suatu kondisi saat belanja daerah sangat dirangsang oleh dana transfer dari pemerintah ketimbang dana yang dihimpun dari pemungutan pajak. Fenomena flypaper effect merupakan suatu keadaan yang dapat terjadi ketika pemerintah daerah merespon belanja daerah lebih banyak menggunakan dana perimbangan untuk belanja daerah ketimbang menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam arti yang lebih luas, fenomena ini menunjukkan bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 1992). Menurut Maimunah (2006), *flypaper effect* adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD.

Setelah Okun mendefinisikan flypaper effect, Henderson (1968) dan Gramlich (1969) mulai melakukan penelitian yang berfokus pada hubungan pajak dan belanja pemerintah daerah. Sejumlah penelitian kemudian berkembang untuk membuktikan apakah *flypaper effect* terjadi atau tidak di daerah, termasuk di Indonesia. Penelitian tersebut menguji secara umum menjelaskan *flypaper effect* sebagai keadaan dimana pemerintah daerah merespon belanja daerah lebih banyak menggunakan dana perimbangan atau transfer dari pemerintah daripada menggunakan PAD.

Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa *flypaper effect* terbukti terjadi di Sumatera Utara (Listrioni, 2012), di Jawa Tengah (Burhanuddin,

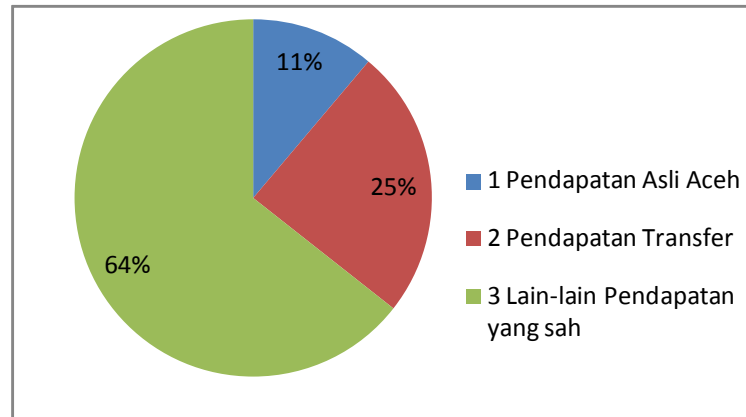
2012), di Kalimantan (Purnomo, 2011), di Sumatera Selatan (Saputra, et al., 2012) dan di Jawa dan Bali (Abdullah dan Halim, 2004). Secara umum salah satu alasannya adalah karena rendahnya kontribusi PAD dibandingkan dengan dana transfer Pemerintah terhadap belanja daerah.

Sejak otonomi daerah dijalankan mulai tahun 1999, Pemerintah memberikan sejumlah kewenangan kepada pemerintah daerah. Karena pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah mentransfer sejumlah dana untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas tersebut kepada daerah, atau hal ini sering diistilahkan dengan *money follows functions*. Transfer dana ini diberikan dalam tiga kelompok besar. Pertama, transfer dana perimbangan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) antara lain DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kedua, transfer Dana Otonomi Khusus yang diberikan hanya untuk Pemerintah Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Terakhir, transfer Dana Penyesuaian yang diberikan dalam bentuk Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah, Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah dan dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2).

Anggaran Pemerintah yang ditransfer untuk belanja daerah meningkat secara sangat signifikan dari Rp129,81 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp528,63 triliun pada tahun 2013. Dari anggaran yang ditransfer tersebut, dana perimbangan memiliki porsi yang tertinggi yaitu mencapai 95% atau sekitar 122,95 triliun pada tahun 2004, meskipun kemudian persinya menurun di tahun 2013 menjadi 84% atau sebesar Rp 444,79 triliun. Sementara itu, porsi dari total transfer dana tersebut untuk pelaksanaan otonomi khusus di Aceh, Papua dan Papua Barat dan dana penyeimbangan meningkat cukup signifikan dari 5% atau 6,86 triliun pada tahun 2004 menjadi 16% atau sekitar 83,83 triliun pada tahun 2013.

Bagi Aceh, peningkatan transfer dana Pemerintah dalam bentuk dana perimbangan dan dana otonomi khusus menjadikan sumber pendapatan yang sangat besar. Dari satu sisi, hal ini dapat dimaknai bahwa tingkat ketergantungan Aceh terhadap Pemerintah sangat tinggi. Pada tahun 2013, kontribusi PAD Aceh relatif kecil hanya sekitar 11%. Sementara itu, lain-lain pendapatan yang sah dalam bentuk Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian menjadi sumber terbesar mencapai 64 persen dari total

pendapatan dan kemudian disusul pendapatan transfer dalam bentuk dana bagi hasil sumber daya alam, DAK dan DAU sebesar 25 persen.



Sumber : Dinas Keuangan Aceh, 2014.

Gambar 1. Komposisi Pendapatan Provinsi Aceh, 2013

Studi ini bertujuan menemukan bukti-bukti empiris apakah *flypaper effect* terjadi di Aceh, khususnya setelah provinsi ini menerima transfer Dana Otonomi Khusus yang jumlahnya relatif besar. Penelitian ini menarik dilakukan di Aceh karena tiga alasan penting. Pertama apakah dana otonomi khusus dapat mengurangi ketergantungan Aceh dalam jangka panjang atau sebaliknya. Kedua, struktur ekonomi Aceh yang secara umum sama dengan struktur ekonomi provinsi lain di Indonesia yang sangat bergantung pada ekonomi tradisional apakah dapat digeser menjadi struktur ekonomi modern yang berbasis sektor tersier, sektor jasa dan industri manufaktur dan kreatif akibat sumber transfer yang besar terutama tambahan dana dari Dana Otonomi Khusus dan minyak dan gas bumi. Ketiga, studi ini memasukkan komponen dana transfer yang lebih lengkap seperti DOP yang hanya dimiliki oleh Aceh dan Papua dan Papua Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Aceh dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini dengan dua kriteria. *Pertama*, kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang mempublikasikan secara konsisten laporan keuangan daerah

dari tahun 2011-2013 yang tersedia di Badan Pusat Statistik Aceh atau Dinas Keuangan Aceh. *Kedua*, kabupaten/kota yang tidak dimekarkan pada kurun waktu 2011-2013. Dari kriteria tersebut, maka sampel merupakan populasi dengan *cross section* sebanyak 23 kabupaten/kota dan *time series* sebanyak tiga tahun (2011-2013), dengan jumlah sampel 69.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pengujian data panel dan analisis deskriptif. Dengan data panel, ada tiga metode yang dapat digunakan yaitu Pooled Least Square (PLS) atau Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Dalam menentukan metode yang terbaik yang digunakan dari ketiga metode tersebut PLS atau CEM, FEM, dan REM, perlu dilakukan pengujian-pengujian berkaitan dengan hal tersebut. Pengujian itu diantaranya adalah uji F, uji Hausman, dan uji LM (Lagrange Multiplier).

Model panel *Ordinary Least* (OLS) dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$BD_{it} = \beta_0_{it} + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DBH_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DAU_{it} + \beta_5 DOP_{it} + u_{it}$$

dimana BD adalah belanja daerah, PAD adalah pendapatan asli daerah, DBH adalah dana bagi hasil, DAK adalah dana alokasi khusus, DAU adalah dana alokasi umum, DOP adalah dana otonomi khusus dan penyesuaian, *i* adalah kabupaten/kota di Aceh, *t* adalah waktu (2011 sampai 2013), β_0 adalah konstanta, β_1 - β_6 adalah koefisien regresi dan *u* adalah *error term*.

Berdasarkan hasil estimasi model tersebut, jika β_1 lebih besar dari hasil penjumlahan β_2 sampai β_5 maka tidak terjadi *flypaper effect* atau daerah tersebut sudah mandiri. Sebaliknya, β_1 lebih kecil dari salah satu nilai β_2 sampai β_5 maka daerah tersebut belum mandiri atau *flypaper effect* terjadi.

Untuk melengkapi analisis model tersebut, studi ini juga menambahkan analisis deskriptif. Analisis tambahan ini untuk membandingkan Aceh dengan provinsi lainnya di Indonesia berdasarkan struktur ekonomi dan kinerja keuangannya. Dengan analisis seperti ini, studi ini ingin menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan struktur ekonomi yang tidak bergantung sangat tinggi kepada sektor tradisional dalam jangka panjang mampu mengurangi ketergantungan keuangan dengan Pemerintah. Salah satu indikatornya adalah perkembangan dan kontribusi PAD di daerah tertentu yang cenderung meningkat dan cukup besar

sehingga dapat digunakan sebagai sumber pendapatan utama yang lebih dominan dibandingkan dengan transfer Pemerintah. Dalam analisis kualitatif deskriptif ini, beberapa variabel makroekonomi ditampilkan dan dianalisis dengan melihat trend an proporsinya terhadap pendapatan regional masing-masing provinsi antara lain pendapatan per kapita, PAD per kapita, serta Dana Perimbangan per kapita dari masing-masing provinsi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

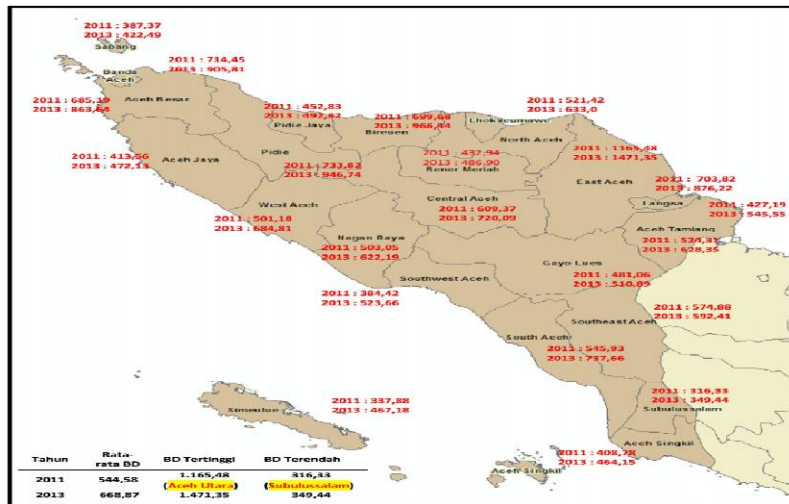
Perkembangan Belanja Daerah di Aceh

Aceh yang terdiri dari 23 kabupaten/kota memiliki tren belanja daerah yang terus meningkat, khususnya setelah adanya transfer dana dalam bentuk Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi. Rata-rata belanja daerah meningkat dari Rp 544,58 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp 668,87 miliar pada tahun 2013. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2, belanja daerah Kabupaten Aceh Utara adalah yang tertinggi mencapai Rp1,2 triliun pada tahun 2011 dan kemudian meningkat menjadi Rp1,5 triliun pada tahun 2013. Kabupaten ini menjadi yang tertinggi dalam hal belanja daerah karena di sana beroperasi beberapa proyek vital, PT. Exxon Mobil, PT. Kertas Kraft Aceh, PT. PIM, dan PT Arun, sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Sedangkan Kabupaten Subulussalam memiliki belanja daerah terkecil hanya sebesar Rp316,33 miliar di tahun 2011 kemudian meningkat menjadi Rp349,44 miliar pada tahun 2013.

Pendapatan Asli Daerah

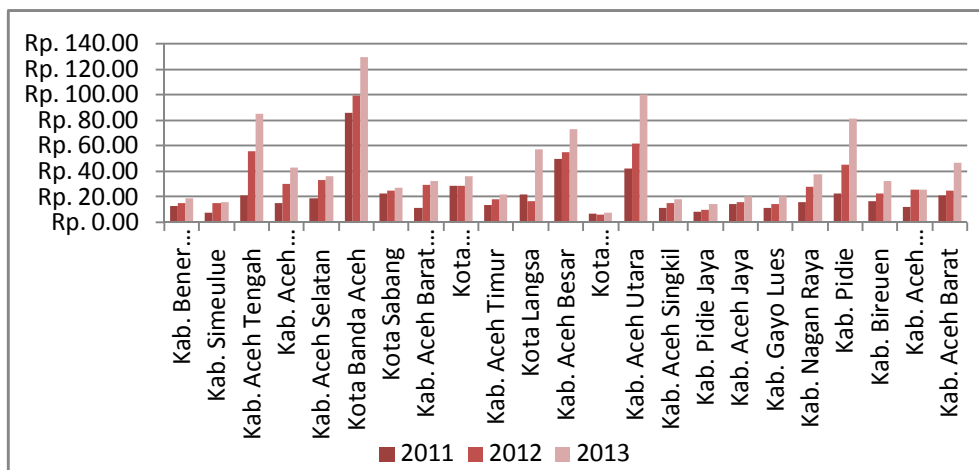
Lima sumber PAD kabupaten/kota di Aceh berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Zakat/Infaq/Sedekah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Selama periode 2011-2013, secara umum PAD di 23 kabupaten/kota di Aceh meningkat, kecuali di Lhokseumawe, Langsa dan Subulussalam yang berfluktuasi sedikit. Kota Banda Aceh mempunyai PAD terbesar yang didominasi oleh komponen Lain-lain PAD yang Sah yaitu sebesar Rp38,83 miliar, diikuti oleh Pajak Daerah sebanyak Rp36,46 miliar. Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh lebih mandiri dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya karena PAD yang dimiliki relatif lebih besar. Sedangkan Kota

Subulussalam memiliki PAD terendah hanya Rp6,83 miliar tahun 2011 dan Rp7,88 miliar tahun 2013.



Sumber: Dinas Keuangan Aceh, 2014.

Gambar 2. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2011-2013 (Miliar Rp)



Sumber : Dinas Keuangan Aceh, 2014.

Gambar 3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2011-2013 (Miliar Rp)

Pemilihan Model Estimasi

Ada tiga model yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian dengan menggunakan data panel. Pertama, model Pooled Least Square (PLS) atau sering disebut dengan Common Effect Model (CEM) yang secara sederhana menggabungkan (pooled) seluruh data time series dengan data cross section yang kemudian mengestimasi model tersebut menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Kedua, Fixed Effect Model (FEM) yang melakukan pertimbangan atau perhitungan terhadap kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah omitted variables dimana masalah ini diduga dapat memberikan pengaruh perubahan pada intercept time series atau cross section. Ketiga, Random Effect Model (REM) yang berguna untuk memperbaiki efisiensi proses Least Square yang memperhitungkan error dari cross section dan time series.

Untuk menentukan model terbaik, beberapa uji dilakukan diantaranya uji Chow atau biasa disebut dengan uji F untuk menentukan apakah menggunakan model PLS (CEM) atau menggunakan FEM. Selanjutnya, uji Hausman untuk menentukan apakah memilih REM atau FEM setelah terbukti dengan uji Chow bahwa FEM yang lebih tepat. Jika dengan kedua pengujian tersebut FEM merupakan model yang paling tepat, maka tidak perlu dilakukan pengujian LM. Namun jika dalam uji Chow menunjukkan bahwa PLS (CEM) merupakan model yang paling tepat, maka perlu dilakukan pengujian LM untuk membuktikan apakah benar bahwa PLS (CEM) yang paling tepat atau REM.

Seperti disarikan pada Tabel 1, Uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari F-ttest sebesar 0,0014 dan Chi-square sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari α sebesar 5 persen. Maka model yang paling sesuai adalah Fixed Effect Model.

Tabel 1. Hasil Uji Chow (Uji F) untuk Menentukan PLS atau FEM

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2,939101	(22,41)	0,0014
Cross-section Chi-square	65,319295	22	0,0000

Sumber : Hasil Studi dengan Eviews 7, 2014.

Demikian juga halnya, sebagaimana disajikan Tabel 2, secara statistik Uji Hausman menunjukkan bahwa FEM adalah model yang paling tepat.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman untuk Menentukan REMatau FEM

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	51,283305	5	0,0000

Sumber : Hasil Studi dengan Eviews 7, 2014.

Estimasi Model yang Dipilih

Berdasarkan pengujian pemilihan model yang akan digunakan dalam estimasi model yang dipilih, FEM merupakan model yang sepertinya menjadi kandidat model yang digunakan dalam studi ini. Hasil estimasi FEM adalah sebagai berikut:

$$BD = 157,67 + 1,24PAD - 0,39DBH + 1,30DAK + 0,79DAU + 0,95DOP$$

$$\begin{matrix} (4,846592) & (3,056608) & (-1,435472) & (2,685397) & (7,033252) & (4,893639) \\ [0,0000] & [0,0039] & [0,1587] & [0,0104] & [0,0000] & [0,0000] \end{matrix}$$

$$Adj. R^2 = 0,988520 \quad DW = 3,46$$

Meskipun berdasarkan pengujian pemilihan model FEM adalah yang terbaik, namun hasil estimasi FEM tidak dapat digunakan karena terdapat bias pada koefisien dari cross section sehingga estimasi yang dilakukan kurang tepat. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien Langsa sebesar 650,92 yang melebihi koefisien Banda Aceh yang hanya sebesar -29,59. Seharusnya koefisien Banda Aceh lebih besar dari Langsa karena BD Banda Aceh lebih besar dari BD Langsa. Permasalahan estimasi ini diduga karena di dalam penelitian ini cross section (26 kabupaten/kota) lebih besar daripada time series (3 tahun), sehingga lebih tepat menggunakan PLS. Jika cross section lebih kecil dari time series maka lebih tepat menggunakan FEM atau REM. Sedangkan jika jumlah cross section sama dengan jumlah time series, maka dapat dipilih untuk menggunakan PLS, FEM maupun REM.

Oleh karena itu, estimasi model yang paling tepat dalam studi ini adalah dengan model PLS seperti ditunjukkan di bawah ini:

$$BD = 1,05PAD + 1,08DBH + 0,83DAK + 1,03DAU + 0,95DOP$$

(4,927071)	(23,61253)	(2,395414)	(19,77519)	(7,006555)
[0,0000]	[0,0000]	[0,0195]	[0,0000]	[0,0000]

$$\text{Adj. } R^2 = 0,979183 \quad \text{DW} = 2,24$$

PAD berpengaruh secara statistik terhadap BD dan memiliki hubungan yang positif. Hal ini bermakna setiap PAD meningkat sebesar Rp1 miliar, maka BD akan meningkat sebesar Rp1,05 miliar. DBH juga berpengaruh secara statistik terhadap BD, dengan nilai p-value sebesar 0,0000. Hubungan kedua variabel ini adalah positif yang berarti bahwa ketika DBH meningkat sebesar Rp1 miliar, maka BD akan meningkat sebesar Rp1,08 miliar. Selain itu, variabel DAK secara signifikan berpengaruh terhadap BD dengan nilai p-value sebesar 0,0195 dan arah hubungan mereka positif. Ini berarti BD akan meningkat sebesar Rp0,83 miliar ketika DAK meningkat sebesar Rp1 miliar. Nilai p-value DAU sebesar 0,0000 menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap BD. Arah hubungannya positif sehingga setiap kenaikan DAU sebesar Rp1 miliar akan diikuti dengan kenaikan BD sebesar Rp1,03 miliar. Terakhir, DOP secara signifikan mempengaruhi BD dengan nilai p-value sebesar 0,0000. BD akan meningkat sebesar Rp0,95 miliar ketika adanya peningkatan DOP sebesar Rp1 miliar.

Untuk menentukan ada tidaknya *flypaper effect* dapat dilihat dari perbandingan besar koefisien PAD dengan koefisien variabel lainnya. Dengan menggunakan hasil estimasi PLS, terlihat bahwa koefisien DBH lebih besar jika dibandingkan dengan variabel PAD. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat *flypaper effect* di Aceh karena pengaruh dari DBH terhadap BD lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh variabel PAD terhadap BD.

Analisis Deskriptif

Tabel 3 menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki kontribusi sektor tersier tertinggi yaitu sebesar 71,46 persen dari total PDRB, diikuti oleh Bali sebesar 66,26 persen. Sedangkan Aceh sangat jauh tertinggal dibandingkan kedua daerah tersebut, yaitu sebesar 41,50 persen. Hal ini memperkuat indikasi bahwa Aceh masih belum mandiri karena sektor tersiernya masih relatif kecil dibandingkan dengan daerah lainnya.

Tabel 3. Peringkat Provinsi Berdasarkan Kontribusi Sektor Primer, Sekunder dan Tersier terhadap PDRB, ADHB dengan Migas, 2012.

Provinsi	Sektor (%)			PDRB (Rp juta)	Peringkat
	Primer	Sekunder	Tersier		
DKI Jakarta	0,56	27,98	71,46	1.103.738.000	1
Bali	17,63	16,11	66,26	83.939.000	2
Maluku	29,39	6,97	63,64	11.469.000	3
DI Yogyakarta	15,32	25,47	59,21	57.034.000	4
Gorontalo	30,58	12,50	56,92	10.368.000	5
Sumatera Barat	25,91	18,78	55,31	110.104.000	6
Sulawesi Utara	20,38	25,53	54,09	47.198.000	7
Nusa Tenggara Timur	37,33	9,13	53,54	35.253.000	8
Kalimantan Tengah	35,20	13,57	51,23	55.876.000	9
Sulawesi Selatan	31,39	18,78	49,83	159.427.000	10
Jawa Timur	19,24	32,41	48,35	1.001.721.000	11
Bengkulu	43,13	8,76	48,11	24.173.000	12
Sumatera Utara	23,20	29,70	47,10	351.118.000	13
Sulawesi Tenggara	37,79	16,42	45,79	36.601.000	14
Kalimantan Barat	26,10	28,28	45,62	75.027.000	15
Maluku Utara	39,56	16,42	44,02	6.918.000	16
Jawa Barat	13,54	42,62	43,84	946.861.000	17
Sulawesi Barat	43,75	13,11	43,14	14.408.000	18
Nusa Tenggara Barat	44,33	12,68	42,99	49.529.000	19
Lampung	37,88	19,46	42,66	144.561.000	20
Sulawesi Tengah	43,48	14,83	41,69	51.062.000	21
Aceh	38,16	20,34	41,50	96.161.000	22
Kalimantan Selatan	42,93	15,62	41,45	75.923.000	23
Jawa Tengah	19,60	39,80	40,60	556.480.000	24
Banten	7,96	53,40	38,64	212.857.000	25
Kep. Bangka Belitung	34,42	28,30	37,28	34.325.000	26
Sumatera Selatan	37,90	28,66	33,44	206.331.000	27
Kep. Riau	11,80	56,37	31,83	91.717.000	28
Papua	59,10	15,09	25,81	77.765.000	29
Jambi	53,76	26,47	19,77	72.654.000	30
Papua Barat	18,65	61,62	19,73	72.654.000	31
Kalimantan Timur	56,00	26,26	17,74	419.102.000	32

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014.

Selanjutnya analisis deskriptif membandingkan Aceh dengan provinsi lainnya yang memiliki karakteristik yang relatif sama yaitu kontribusi

sektor primer yang relatif besar. Aceh dengan kontribusi sektor Primer yang lebih kecil tetapi memiliki tingkat ketergantungan yang paling tinggi. Berbeda dari Kalimantan Timur, meskipun hampir setengah kontribusi PDRB berasal dari sektor primer tetapi memiliki PAD cukup tinggi hampir setengah dari total penerimaan daerah.

Tabel 4. Struktur Penerimaan Daerah Berdasarkan Besarnya Sektor Primer terhadap PDRB, 2012

No	Provinsi	Kontribusi Sektor Primer (%)	% PAD terhadap Pendapatan	% DP terhadap Pendapatan	Total Pendapatan Daerah (miliar)
1	Bengkulu	43,13	31%	57%	Rp 1.562,53
2	Sulawesi Tengah	43,48	37%	61%	Rp 1.410,59
3	Kalimantan Selatan	42,93	57%	35%	Rp 4.381,68
4	Papua	59,10	22%	78%	Rp 2.710,38
5	Kalimantan Timur	56,00	45%	52%	Rp 11.816,60
6	Aceh	38,16	10%	90%	Rp 9.180,14

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014 (diolah)

Perbandingan selanjutnya dilakukan antara Aceh dan provinsi lain yang dianggap lebih mandiri seperti DKI Jakarta dan Bali. Kedua provinsi ini memiliki struktur ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan Aceh. Perbandingan ini dilakukan dengan melihat struktur penerimaan daerah serta struktur perekonomian.

DKI Jakarta memiliki porsi PAD terhadap penerimaan daerah terbesar yaitu mencapai 62 persen, kemudian Bali 56 persen dan Aceh hanya 10 persen. Sebaliknya, Aceh memiliki porsi DP terbesar dalam struktur penerimaan daerah mencapai 90 persen kemudian disusul DKI Jakarta 33 persen dan terakhir Bali sebesar 25 persen. Ini menunjukkan bahwa Aceh sangat tergantung terhadap DP karena 90 persen pendapatan Aceh bersumber dari DP, dan sisanya hanya sebanyak 10 persen dari PAD.

Tabel 5. Struktur Penerimaan dan Ekonomi Daerah, 2012 (miliar dan persen)

No.	Dasar Pemanding	Jakarta	Bali	Aceh
1	Struktur Penerimaan Daerah			
1.1	Total Pendapatan Daerah	Rp. 35.379	Rp. 3.633	Rp. 9.180
1.2	PAD	Rp. 22.041	Rp. 2.042	Rp. 902
1.3	Dana Perimbangan (miliar)	Rp. 11.555	Rp. 908	Rp. 8.278
	% PAD terhadap pendapatan	62%	56%	10%
	% DP terhadap pendapatan	33%	25%	90%
2	Struktur Ekonomi Daerah			
2.1	PDRB ADHK 2000	Rp. 449.821	Rp. 32.804	Rp. 36.600
	Kontribusi sektor primer*)	0,3%	19,2%	34,0%
	Kontribusi sektor sekunder**)	25,2%	15,8%	17,5%
	Kontribusi sektor tersier***)	74,5%	64,9%	48,5%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014.

Catatan : *) terdiri dari sektor pertanian; dan sektor pertambangan dan
 **) penggalian
 terdiri dari sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan
 ***) air minum; dan sektor bangunan dan konstruksi.
 terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor
 pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan
 dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa.

Dari struktur ekonomi daerah, kontribusi terbesar terhadap PDRB di DKI Jakarta adalah sektor tersier mencapai sebesar 74,5 persen, diikuti oleh sektor sekunder 25,2 persen dan sektor primer hanya 0,3 persen. Kontribusi sektor terbesar di Bali adalah sektor tersier sebesar 64,9 persen, sedangkan sektor sekunder dan primer masing-masing sebesar 15,8 persen dan 19,2 persen. Di Aceh, sektor tersier merupakan sektor yang terbesar yaitu 48,5 persen, diikuti sektor primer 34,0 persen dan sekunder 17,5 persen. Aceh masih belum memiliki potensi besar dalam meningkatkan PDRB dari sektor tersier. Hal ini juga menunjukkan Aceh masih tergantung terhadap sektor primer yang didominasi di bidang pertanian.

SIMPULAN DAN SARAN

Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, masing-masing secara statistik memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Daerah. Karena koefisien PAD lebih kecil dibandingkan dengan koefisien DBH, *flypaper effect* terjadi di Aceh sehingga kemandirian daerah dalam otonomi daerah belum berjalan di Aceh. Provinsi DKI Jakarta dan Bali relatif lebih mandiri dibandingkan dengan Provinsi Aceh karena struktur perekonomian kedua daerah tersebut relatif didominasi oleh sektor tersier sehingga memiliki kontribusi PAD yang melebihi kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan

Berdasarkan hasil analisa ini, dalam mengatasi *flypaper effect* pemerintah Aceh harus meningkatkan PAD dengan cara mendorong serta merubah sektor perekonomian dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi kreatif yang didominasi oleh sektor tersier. Ketika daerah didominasi oleh sektor tersier, maka secara umum daerah tersebut akan memiliki kontribusi PAD terhadap belanja daerah yang relatif lebih besar. Selain itu, belanja daerah seharusnya dialokasikan pada belanja modal yang bersifat jangka panjang dan memiliki *multiplier effect* yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2014. PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2000 di Provinsi Jakarta, Bali, dan Aceh 2012. Diakses pada <http://www.bps.go.id>. tanggal 5 Oktober 2014.
- _____. 2014. Pendapatan, PAD, dan Dana Perimbangan Provinsi Jakarta, Bali, dan Aceh 2010-2012. Diakses pada <http://www.bps.go.id>. tanggal 5 Oktober 2014.
- Burhanuddin, Ahmad. Pengaruh Belanja Pegawai, Investasi Pemerintah dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah terhadap Fenomena Flypaper Effect. *Accounting Analysis Journal* Vol. 1 No.1. 2010.
- Dinas Keuangan Aceh. 2014. APBD 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 2011-2013.
- Gramlich, Edward. State and Local Governments and their Budget Constraint. *International Economic Review* Vol . 10. June 1969, (163-182).

- Gujarati, Damodar N. "Basic Econometrics, 4th ed". McGraw-Hill. New York, 2004.
- Henderson, James. Local Government Expenditures: A Social Welfare Analysis. *Review of Economics and Statistics*, Vol. 50, May 1968, (156-163).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. Anggaran Belanja untuk Daerah Tahun 2004-2013. Diakses pada <http://www.kemenkeu.go.id>. tanggal 07 Maret 2014.
- _____. (2014). **Leaflet-djpk**. Diakses pada www.djpk.kemenkeu.go.id/publikasi/leaflet-djpk tanggal 25 Mei 2014.
- Listiorini. (2012). "Fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara". **Jurnal Keuangan dan Bisnis**. Vol. 4 No. 2, Juli 2012.
- Maimunah, Mutiara. (2006). "Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera". **Simposium Nasional Akuntansi IX**. Padang.
- PMK Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
- PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
- Turnbull, G.K. Fiscal Illusion, Uncertainty, and the Flypaper Effect. *Journal of Public Economics*, Vol.48(2), Juli 1992, (207-223).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Lampiran 1: Estimasi dengan Fixed Effect Model

Dependent Variable: BD?

Method: Pooled Least Squares

Date: 10/22/14 Time: 21:22

Sample: 2011 2013

Included observations: 3

Cross-sections included: 23

Total pool (balanced) observations: 69

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	157,6615	32,53038	4,846592	0,0000
PAD?	1,238519	0,405194	3,056608	0,0039
DBH?	-0,390683	0,272164	-1,435472	0,1587
DAK?	1,295928	0,482584	2,685397	0,0104
DAU?	0,788609	0,112126	7,033252	0,0000
DOP?	0,952496	0,194640	4,893639	0,0000
Fixed Effects (Cross)				
_ABARAT--C	-57,49106			
_ABESAR--C	-100,5378			
_ASELATAN--C	-33,04481			
_ASINGKIL--C	14,28072			
_ATENGAH--C	-31,26868			
_ATENGGARA--C	-19,34950			
_ATIMUR--C	-49,72893			
_AUTARA--C	-53,77881			
_BIREUEN--C	29,64277			
_PIDIE--C	67,18073			
_SIMEULUE--C	-61,91735			
_BANDAACEH--C	-29,59438			
_SABANG--C	-69,98354			
_LANGSA--C	650,9217			
_LHOKSEUMAWE--C	-57,89674			
_GAYOLUES--C	-41,95465			
_ABARATDAYA--C	-53,12601			
_AJAYA--C	-26,73870			
_NAGANRAYA--C	-18,75885			
_ATAMIANG--C	-7,453485			
_BENERMERIAH--C	25,68567			
_SUBULUSSALAM--C	-30,73795			
_PIDIEJAYA--C	-44,35037			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0,993078	Mean dependent var	597,4645
Adjusted R-squared	0,988520	S.D. dependent var	217,3570
S.E. of regression	23,28862	Akaike info criterion	9,424867

Sum squared resid	22236,76	Schwarz criterion	10,33146
Log likelihood	-297,1579	Hannan-Quinn criter,	9,784543
F-statistic	217,8654	Durbin-Watson stat	3,455629
Prob(F-statistic)	0,000000		

Lampiran 2: Estimasi dengan Pool Least Square (PLS) atau Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: BD?
Method: Pooled Least Squares
Date: 10/22/14 Time: 21:20
Sample: 2011 2013
Included observations: 3
Cross-sections included: 23
Total pool (balanced) observations: 69

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD?	1,054784	0,214079	4,927071	0,0000
DBH?	1,080192	0,045747	23,61253	0,0000
DAK?	0,826761	0,345143	2,395414	0,0195
DAU?	1,031442	0,052158	19,77519	0,0000
DOP?	0,948598	0,135387	7,006555	0,0000

R-squared	0,980408	Mean dependent var	597,4645
Adjusted R-squared	0,979183	S.D. dependent var	217,3570
S.E. of regression	31,36025	Akaike info criterion	9,798663
Sum squared resid	62941,77	Schwarz criterion	9,960555
Log likelihood	-333,0539	Hannan-Quinn criter,	9,862891
Durbin-Watson stat	2,243185		